

	News Title : Tahun Depan Indonesia Tentukan Harga CPO Dunia, Bappebti Jangan PHP	
	Media Name : Inilah.com	Journalist : Iwan Purwantono
	Publish Date : 19 October 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Bappebti)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Bisnis	Topic : sawit

BISNIS

Tahun Depan Indonesia Tentukan Harga CPO Dunia, Bappebti Jangan PHP

Rabu, 19 Okt 2022 - 20:28 WIB

Penulis : [Iwan Purwantono](#)



BERIKUTNYA



Semester I-2022,
Bank Jatim Kempit
Laba Bersih Rp815
Miliar

Mudah-mudahan ini bukan PHP atau pemberi harapan palsu. **Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi** (Bappebti) Kementerian Perdagangan berjanji tahun depan Indonesia tentukan **harga minyak sawit mentah** (CPO).

Ya, betul, Bappebti Kemendag menargetkan setahun ke depan, komoditas minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia ditetapkan sebagai harga acuan dunia.

Modal kuat dari keinginan itu, tentu saja karena market share CPO RI yang cukup tinggi di dunia. "CPO kita 40 persen share dunia dari Indonesia. Bikin harga dong. Masak kita lihat Rotterdam (Belanda)," ujar Plt Kepala Bappebti Kemendag, Didid Noordiatmoko, Jakarta, Rabu (19/10/2022).

Baca juga
Blusukan ke Pasar NTT, Mendag Zulhas: Harga Bahan Pangan Stabil



Didid menambahkan, kasus kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng yang sempat terjadi beberapa waktu lalu menyadarkan pemerintah bahwa meski merupakan negara produsen CPO terbesar dunia, harga komoditas tersebut masih mengacu pada bursa di Rotterdam dan Malaysia.

"Yang menggelitik kami di Bappebti, kasus minyak goreng kemarin itu ternyata kita masih mengacu harga dunia, kita tidak punya," kata dia.

Didid menuturkan, pihaknya akan berdiskusi perihal tata kelola dan tata niaga CPO dengan pemangku kepentingan terkait, mulai dari Kementerian/Lembaga, hingga pelaku usaha terkait apa saja yang perlu dilakukan agar komoditas CPO bisa diperdagangkan di bursa berjangka.

Baca juga
Kemendag Musnahkan 15 Produk Impor Ilegal Senilai Rp11 Miliar



Menurutnya, transaksi di bursa berjangka akan membuat tata kelola komoditas bisa lebih transparan, mulai dari pembentukan harga hingga volume perdagangan. "Ketika sudah transparan, kebijakan lainnya bisa diambil. Apakah mau DMO, DPO, itu nanti dari situ. Lebih mudah," ucapnya.